

POLITIK PENCITRAAN DAN POLEMIK SOSIAL-POLITIK MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KARYA SASTRA

Yerri Satria Putra

Pendahuluan

Bagi sebagian orang, istilah sastra politik apalagi sebagai genre sastra mungkin masih menjadi kontroversi. Alasannya karena istilah tersebut dinilai jauh dari prinsip-prinsip sastra yang selama ini mereka yakini sebagai suatu opsi yang berdiri sendiri. Ariel Heryanto dalam tulisannya menyebutkan bahwa kontroversi mengenai genre sastra politik ini masih ditolak oleh kalangan sastrawan yang menganut sastra universal yang pandangannya paling berpengaruh. Mereka menganut prinsip sastra yang terbebas dari politik karena sastra merupakan seni yang lahir dari batin sastrawan. Bagi mereka, satu-satunya ideologi kepenyairan adalah universalisme, sedangkan tanah airnya adalah kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Geoge Orwell bahwa pengarang hanya harus terlibat pada satu hal saja: sastra dan biarkanlah sosiolog yang berkompeten berbicara soal-soal sosial.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai istilah ini, pertama, sastra merupakan seni yang lahir dari dinamika sosial. Dalam bahasa, Hippoyte Taine (1766-1817), peletak dasar sosiologi sastra modern, sastra dipengaruhi oleh ras, momen, dan lingkungan. Kedua, diakuinya relasi sastra dan politik secara akademik dalam literatur sosiologi sastra. Selain Taine, ada banyak ahli sastra yang mengembangkan teorinya. Diantaranya adalah Diana Laurenson (1972) dengan teori patronasinya. Sebelumnya, Raymond William (1967), memunculkan teori hegemoni (perluasan dan pelestarian 'kepatuhan aktif' dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik). Teori William ini dibuktikan oleh Tony Davies. Dalam risetnya, ia menemukan bahwa sastra telah berfungsi mendidik masa untuk tidak menjadi radikal dan kasar, melainkan berperasaan, berpikiran halus dan anggun, bahkan berfungsi sebagai pembangun citra kesatuan imajiner dari suatu formasi sosial yang disebut bangsa.

Max Aderet (1975) selanjutnya mengidealkan corak *literature engage*, yaitu sastra yang terlibat dalam melancarkan protes terhadap tata masyarakat yang

buruk dan ketidakadilan sosial. Namun, Stendhal (1783-1841), seorang novelis Prancis, mengingatkan agar masuknya unsur politik atau ideologi dalam sastra tersalur secara formal dan wajar, tidak secara *en masse* (besar-besaran). Belakangan Terry Eagleton (1983), dengan mengutip Engel, mengetengahkan pandangan bahwa sastra bisa menjadi elemen aktif dalam suatu perubahan. Dalam sejarah sastra Indonesia, harus diakui, sastra berkembang oleh karena patronase negara, paling tidak kebebasan yang diberikannya, sebagaimana dibenarkan teori Diana Laurenson. Yang paling tampak adalah patronase Balai Pustaka (Kantoor voor Volkslectuur), sebuah lembaga politik sastra Kolonial Belanda (berdiri 1908), yang pada masa itu diketuai oleh Dr. G.A.J Hazeu. Baru pada tahun 1917 Volkslektur itu berubah namanya menjadi Balai Pustaka dan para redaktornya terdiri atas para penulis dan ahli bahasa melayu.

Selama masa berdirinya, Balai Pustaka diserahkan tugas-tugas penting yang meliputi, pertama, menerbitkan naskah-naskah lama yang bila perlu dapat diubah dan disempurnakan, menerbitkan saduran dan terjemahan hasil karya pujangga-pujangga asing kenamaan, seperti Shakespeare, Cervantes, Alexander Damas, Jules Verne, Tolstoi, Rudyat Klipling, Rabindranath Tagore. Fase terakhir barulah menerbitkan naskah-naskah pengarang muda bangsa Indonesia, baik berupa puisi maupun prosa. Selain itu, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah-majalah untuk konsumsi masyarakat kelas bawah seperti, Panji Pustaka dan Sari Pustaka dalam bahasa Melayu, Kejawan dalam bahasa Jawa, dan Parahiangan dalam bahasa Sunda.

Kelahiran novel modern dan juga kepopulerannya pun, sebagaimana dijelaskan A. Teeuw, dimungkinkan terutama oleh karena adanya lembaga tersebut. Hal ini karena Balai Pustaka memiliki segmen pembaca yang paling luas berkat perpustakaan, pemasarannya yang baik, dan harga bukunya murah. Namun, sebagai lembaga penerbitan pemerintah Kolonial, Balai Pustaka menolak untuk menerbitkan naskah buku atau novel yang mengandung pandangan politik yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, atau novel yang dianggap porno, menyinggung perasaan-perasaan golongan tertentu dalam masyarakat, mengandung ajaran-ajaran agama yang radikal.

Politik pencitraan yang dilakukan Belanda juga terdapat dalam novel TTPRSSB. Seperti dalam beberapa bagian teks, pengarang memberikan penilaian positif tentang kebijakan pemerintahan Belanda kepada masyarakat Sumatera Barat. Seperti pemikiran TPR yang menganggap bahwa Belanda lah yang telah memajukan negeri Sumatera Barat, dan masyarakat Sumatera Barat sudah sepantasnya berterimakasih untuk itu.

“ ... apakah paedahnja kita melawan Goebnemen? Jika kita berperang karena oeng, perang karena hawa dan nafsoe, terpedaja kita oleh iblis Kita dipelihara oleh Pemerintah Belanda. Selama Pemerintah Belanda memerintah negeri kita, bertambah aman sentosa negeri kita, jaitu disoeroeh dirikannja beberapa sekolah, tempat anak-anak kita beladjar, jaitu beladjar ilmoe doenia, sebagai jang soedah akoe tjeritakan dahaeloe ... ” (Maradjo. 128: 27).

Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa kehadiran Balai Pustaka memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia, Balai Pustaka telah memberi kesempatan kepada para pengarang untuk mengembangkan bakatnya juga, lembaga tersebut telah memberikan kepada masyarakat Indonesia buku-buku bacaan yang penting bagi kemajuan intelektual masyarakat Indonesia.

Dari Balai Pustaka, berbagai pengarang muncul dan menjadi fenomena di dalam dunia sastra Indonesia dan dunia. Sebut saja Marah Rusli (1898) yang mejadi terkenal berkat karya-karyanya, seperti Siti Nurbaya, Anak dan Kemenakan, Memang Jodoh (autobiografi). Juga ada Merari Siregar, dengan karyanya Azab dan Sengsara, Si Jamin dan Si Johan. Nur Sutan Iskandar (1893) yang dijuluki sebagai "Raja Pengarang" karena produktifitasnya dalam mengarang sangat tinggi. Beberapa karyanya antara lain: Salah Pilih, Karena Mertua, Neraka Dunia, Hulubalang Raja, Katak Hendak Menjadi Lembu, dan Cinta Tanah Air. Setelah itu, ada Aman Datuk Modjomdo (1895). Dia bekerja di Balai Pustaka, kemudian diangkat menjadi pembantu ahli bahasa pada Balai Pustaka. Perhatiannya lebih tertuju pada cerita anak-anak. Karyanya antara lain: Rusmala Dewi, Hang Tuah, Si Cebol Rindukan Bulan, Si Dul Anak Betawi, Anak Nelayan, Menebus Dosa, dan Cita-Cita Mustafa. Sunan Hasibuan (1904) seorang pengarang roman detektif, karyanya antara lain: Kawan Bergelut (kumpulan cerpen), Mencari Pencuri Anak Perawan, Kasih Tak Terlerai, Percobaan Setia, Tebusan Darah, dan Kasih Tersesat. I. Gusti Nyoman Pandji Tisna (1908). Bahasa dalam karangannya berlainan dengan pengarang-pengarang yang berasal dari Minangkabau. Karyanya antara lain: Ni Rawit, Ceti Penjual Orang, Sukreni Gadis Bali, dan Dewi Karuna. Sariamin Sariamin, bernama samaran Selasih atau Selagari. (1909). Karyanya antara lain: Kalau Tak Untung, dan Pengaruh Keadaan. Hamidah (Fatimah Hasan Delais: 1914-1953). Seorang wanita yang terkenal dengan karyanya Kehilangan Mustika. Abdoel Moeis (1886). Karyanya antara lain: Salah Asuhan, Penemuan Jodoh, dan Robert Anak Surapati.

Polemik Sosial Politik Minangkabau dalam Karya Sastra

Novel Tjeritera Toeankoe Pantjoeran Rawang dan Sjair Si Bakri (TTPRSSB) adalah salah satu novel yang diterbitkan oleh Kantoer voor Volkslectuur atau Balai Pustaka. Novel ini dikarang oleh Sj. B. Maradjo dan diterbitkan pada tahun 1925. Novel ini mengandung romantisme sejarah masa lalu, tepatnya masa-masa kolonialisme Belanda. Berlatar Minangkabau yang kental, novel ini sarat akan unsur politis dan kepentingan kolonialisme. Novel TTPRSSB memilih karakter seorang ulama sebagai tokoh utama dalam penceritaan, padahal pada saat itu, tidak banyak novel yang diterbitkan Balai Pustaka yang menggunakan karakter ulama sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Fenomena penokohan di novel TTPRSSB ini bisa saja terjadi mengingat wilayah Minangkabau, latar utama penceritaan, merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti yang terefleksi dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat mamakai syarak mangato* dan bagi masyarakat Minangkabau, adat Minangkabau adalah

Islam, orang Minangkabau yang tidak beragama Islam berarti tidak beradat "*baraja adat-baraja agamo, indak baradat-indak baragamo*". Oleh karena itulah peran seorang ulama menjadi sangat penting dalam pranata sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam konteks sosio-historis, pada abad ke-12/13, agama Islam masuk ke Sumatra Barat, ialah Syekh Burhanuddin, atau Burhân Al-Dîn atau Tuanku Ulakan (w. 1056-1104/1646-1692), murid dari Syekh Abd. Al Ra'ûf Al-Sinkilî (w. 1024-1105/1615-1693), yang membawa dan mengembangkannya. Dimulai pertama kali di seputar wilayah rantau Pariaman, kemudian meluas ke daerah lainnya di Sumatra Barat. Navis (1980), menyebutkan bahwa perkembangan agama Islam di Sumatra Barat, dari dari faham yang pertama hingga masuknya faham baru, berlangsung selama kurang lebih limapuluh tahun. Namun, apabila ditilik dari sumber-sumber lainnya, maka, kurun waktu antara masa Syekh Burhân Al-Dîn dengan masuknya ideologi keislaman setelahnya yakni Naqsyabandiyah, adalah selama 127 tahun (Fathurahman, 2003).

Masyarakat Minangkabau terkenal sebagai kelompok pemeluk Islam fanatik. Hal ini ditandai dengan sangat mudahnya agama Islam masuk dan berkembang di wilayah Minangkabau, dan hingga kini agama mayoritas orang Minangkabau adalah Islam. Pesatnya perkembangan Islam di Minangkabau tak lepas dari membaurnya agama Islam dengan budaya Minangkabau. Yatim (2002:202) menyebutkan bahwa para sufi Timur Tengah mendapatkan kemudahan dalam menyebarkan agama Islam, karena adanya sinkronisasi antara kepercayaan Hindu yang dianut oleh penduduk pribumi dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh para sufi tersebut. Salah satu ajaran tasawuf yang kontroversial yakni *martabat tujuh*. Dalam ajaran *martabat tujuh* disebutkan bahwa yang dimaksud wujud itu hanya satu walau kelihatannya banyak. Wujud yang satu itu memiliki dua dimensi yakni, dimensi batin (isi) dan dimensi lahir (kulit). Semua benda yang tampak adalah manifestasi dari dimensi batin, yaitu wujud yang hakiki, Allah S.W.T. Wujud yang hakiki itu mempunyai tujuh martabat, yakni 1). *Ahadiyah*, wujud hakiki Allah S.W.T., 2). *Wahdah*, hakikat Muhammad, 3). *Wahidiyah*, hakikat Adam, 4). *Alam Arwah*, hakikat nyawa, 5). *Alam Mitsal*, hakikat segala bentuk, 6). *Alam Ajsam*, hakikat tubuh, 7). *Alam Insan*, hakikat manusia. Kesemuanya bermuara pada yang satu, yakni *Ahadiyah*, Allah S.W.T.

Namun demikian, fanatisme orang Minangkabau terhadap agama Islam itu tidak sedikit pula melahirkan gejolak hingga konflik antar kelompok Islam di Minangkabau. Sejarah mencatat beberapa konflik antar kelompok Islam di Minangkabau terjadi karena adanya ketidakserasian faham yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Dimulai dengan masuknya aliran-aliran Islam tradisional yang berfaham tareqat hingga aliran-aliran Islam modern yang non tareqat. Sebut saja misalnya gerakan paderi yang meletus pada tahun (w. 1821-1830). Amran (1980:386), mengatakan bahwa pemberontakan Paderi ini adalah puncak dari rangkaian perdebatan mengenai benar dan salah, halal dan haram dalam ajaran Islam yang berkembang sebelumnya. Kaum Paderi beranggapan bahwa Islam yang dianut oleh masyarakat sebelumnya, kaum tua, penuh dengan unsur-unsur animisme, mistik, takhayul, *bid'ah* dan *khurâfât*. "...gerakan Pidari ini

dikembangkan oleh orang-orang yang penuh cita-cita, bersedia berkorban, penuh dinamisme. Tetapi kemudian sering dipaksakan secara berlebih-lebihan, terlalu picik dan kolot, kadang-kadang sama sekali tidak ada lagi hubungannya dengan agama yang ingin mereka “murnikan” sendiri. Bahwa mereka menentang adat istiadat yang bertentangan dengan agama, kita mengerti sekali...”. Atas alasan ini pula, mungkin, Belanda menilai bahwa kedinamikaan yang ada di Minangkabau dapat mempersulit posisi mereka dalam melaksanakan rencana kolonialnya. Gerakan Paderi membuktikan kalau konflik horizontal yang acap kali terjadi itu menyeret keterlibatan pemerintah kolonial Belanda ke dalam konflik, bahkan gerakan itu menjadi gerakan terlama yang akhirnya mengarah pada gerakan anti kolonialisme.

Tokoh utama dalam cerita adalah seorang ulama besar Minangkabau. Hal ini mengingatkan juga kepada institusi surau yang ada di Minangkabau. Surau merupakan bangunan kecil di tepi batang air, beratap dan berlantai, yang berfungsi sebagai tempat sembahyang sehabis mandi, ataupun untuk sembahyang pada masa bekerja di sawah dan di ladang, misalnya sembahyang Dzuhur dan Ashar. Dalam adat, surau berfungsi sebagai tempat berkumpul, bertemu, rapat dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah baliq serta bagi orang laki-laki tua yang tidak beristri atau telah uzur (Azra, 2003:8). Oleh karena adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, maka kaum laki-laki tidak memiliki tempat di *rumah gadang*, untuk itu di suraulah mereka tinggal. Begitu signifikannya posisi surau di tengah masyarakat Minangkabau –terutama kaum laki-laki– maka, surau tidak lagi hanya sekedar identitas bagi umat muslim di Sumatera Barat, namun surau telah menjadi identitas budaya untuk pengertian lebih luas.

Dari proses pendidikan agama yang dijalankan oleh seorang Minangkabau di surau, ada hal yang menarik yang juga ditampillkan di dalam novel TTPRSSB, yaitu hampir sebagian besar murid selalu mencari kesempurnaan ilmu dari beberapa guru atau syekh. Proses belajar yang berpindah-pindah ini dilakukan oleh sang murid karena keinginannya menguasai suatu bidang kelimuan, yang ia anggap tidak akan dapat ia peroleh di tempat yang lama.

“... biasanja orang siak mengadji berpindah-pindah, daro satoe negeri ke lain negeri ... Akan si Midoen demikian juga halnya, hingga sampai ia mengadji ke Padang, Pariaman dan beberapa negeri ketjil-ketjil. Adalah doea tahoen lamanja ia sebentar-sebentar pindah itoe, kemoedian kembali poela ke Padang Ganting ... (hlm. 7)”

Kegigihan orang Minangkabau dalam mencari ilmu merupakan refleksi dari falsafah hidupnya tentang akal. Akal dapat diartikan secara luas, dalam beberapa konteks, akal dapat dimaknai sebagai ilmu. Dalam falsafah hidup orang Minangkabau disebutkan bahwa seseorang dalam menjalani kehidupannya haruslah memakai dan menggunakan akalnya “*iduik baraka, mati bakiro*”, karena jika dalam menjalani kehidupannya seseorang tidak berakal maka hidupnya pasti akan sengsara dan terhina. “*ketiadaan ameh buliah dicari, ketiadaan aka putuih tali*”, artinya

bagi orang Minangkabau, kekurangan emas (harta) masih dapat dicari apabila seseorang itu berakal (berilmu), tetapi jika sudah kekurangan akal (tidak berilmu) bukan saja akan hidup sengsara tetapi juga akan terhina, *tak baraméh putuih tali, tak baraka tarban bumi*. Navis (1982) menerangkan bahwa bagi orang Minangkabau, ada empat hal kegunaan akal, yakni: pertama, untuk memelihara budi agar senantiasa luhur. Kedua, untuk memelihara diri agar senantiasa selamat. Ketiga, untuk memelihara kaum agar senantiasa sejahtera. Keempat, untuk memelihara harta agar senantiasa memberi rahmat (hlm. 98).

Dalam novel TTPRSSB, pandangan tentang ilmu tergambar dari latar kehidupan tokoh utama, TPR, yang digambarkan sebagai seorang pencari ilmu dan akhirnya karena ilmu juga TPR selamat dari berbagai mara bahaya.

“Ilmoe doenia? ... Oempamanja pandai membadjak dan mentjangkoel (kerdja sawah ladang), tahoe menghetam dan menggergadji (bertoe kang), tjakap berniaga joeal beli, ilmoe jang akan pentjari nafkah ... lain pada itoe, perloe poela ilmoe akan mentjari kesehatan. Pandang poela orang jang sehat badannja tapi miskin, lebih senang djoega hidoepnja, dari pada seorang kaja jang sakit-sakit selaloe ...” (hml. 11).

Dalam kesempatan lainnya, konsep tentang esensi ilmu tergambar juga dalam situasi ketika TPR yang menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, dan selalu memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya tersebut. Tetapi dari sudut pandang sastra politik, situasi ini malah melahirkan konsep pencitraan pendidikan modern, yang dinilai lebih tinggi dan lebih maju dibandingkan pendidikan tradisional (surau), hal ini jelas bertentangan dengan latar pendidikan TPR itu sendiri.

Sastra dan Sejarah

Berawal dari pemikiran bahwa sastra adalah refleksi kehidupan masa lalu, maka hubungan antara sastra dan sejarah pun tidak bisa dihindari. Dalam buku *The Act of Creation: A Study of the Conscious and Unconscious in Science and Art* (1967), Arthur Koestler mencoba mengklasifikasikan berbagai penemuan “besar” umat manusia sepanjang sejarah. Dari hasil klasifikasi tersebut, Arthur menyimpulkan bahwa hampir sebagian besar peristiwa di dalam karya sastra merupakan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masanya. Menurut Arthur, hal ini terjadi lantaran sang pujangga sastra sering mencuplik peristiwa sejarah sebagai latar cerita karyanya, atau mediasi menyangkutkan imajinasinya. Dengan demikian, seorang kritikus sastra yang hendak melakukan penelitian sejarah harus menelusuri juga berbagai literatur sastra warisan sebuah zaman. Misalnya dalam karya Aleksander Puskin (1799–1837), yang berjudul *Putri Kapten* (*The Captain's Daughter*). Karya sastra –yang berujud novel– ini mengisahkan pemberontakan petani Pugachov melawan Peter I.

Kuntowijoyo (1999:127) menyebutkan bahwa kerja seorang sejarawan sangat rumit. Ia mesti bergelut dengan “seabrek” kaidah metode ilmiah guna

“menceritakan” sejarah yang telah direkonstruksinya. Sejarawan harus mampu menyuguhkan tulisan sejarah sebagaimana adanya. Ia juga harus bersandar pada prosedur tertentu yang mesti tertib dalam penempatan ruang dan waktu, konsisten dengan unsur-unsur lain seperti topografi dan kronologi, serta harus menyajikan argumen berdasarkan bukti-bukti.

Oleh karena itu, seorang kritikus sastra pun harus menyadari akan nilai-nilai validitas kesejarahan dalam sebuah karya sastra. Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa sastra adalah refleksi kehidupan masa lalu. Sebagai sebuah refleksi, maka nilai-nilai dalam suatu masa tidak akan hadir secara nyata di dalam sebuah karya sastra. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijaksana dalam menangani sebuah karya sastra sejarah adalah selalu memposisikan karya sastra sebagai karya fiksi yang mengandung unsur sejarah, bukan karya sastra sebagai bukti sejarah yang otentik.

Begitu pula dengan perlakuan terhadap novel TTPRSSB, yakni dengan tidak mengesampingkan atau mengaburkan bahwa karya ini adalah karya fiksi, sedangkan nilai-nilai keserajahan yang terdapat di dalam novel TTPRSSB merupakan refleksi yang dicuplikan oleh pengarang berdasarkan imajinasinya terhadap kehidupan yang dilaluinya.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mendapat tekanan politik yang berat selama diberlakukannya sistem budidaya kopi, *cultuurstelsel*, di Indonesia dan Sumatera Barat, khususnya lagi. Pemberlakuan *cultuurstelsel* ini dinilai oleh banyak kalangan sangat tidak manusiawi, karena ada unsur paksaan di dalamnya, selain itu, di dalam negeri pun, tuntutan agar kebijakan ini dihentikan sangat kuat. *Cultuurstelsel* oleh banyak kalangan di negeri Belanda dinilai sebagai faktor utama penyebab merosotnya produksi kopi di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, yang sudah sangat parah. Berbagai alternatif dilakukan untuk meningkatkan kembali produksi kopi di Sumatera, seperti dengan menaikkan harga kopi dari 14 Gulden menjadi 25 Gulden per pikul, namun usaha itu tidak banyak membantu terhadap produksi kopi di Sumatera (Amran. 1988:5).

Solusi yang diambil oleh pihak Belanda untuk mengatasi persoalan ini adalah mengganti sistem *cultuurstelsel* menjadi pajak penghasilan. Kewajiban membayar pajak ini sudah tentu di tentang oleh banyak masyarakat di Sumatera Barat. Dalam laporan W.J.M. Michielsen yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Sumatera Barat disebutkan bahwa sebageaian besar masyarakat Sumatera Barat menolak membayar pajak kepada Belanda, jikapun ada yang bersedia, itu lebih dikarenakan mereka takut kepada penghulu kepala atau kepala larasnya, juga karena ancaman-ancaman yang mereka terima dari luar. Masa Perang Paderi dan *cultuurstelsel* adalah dua masa yang membuat kehidupan mereka sangat berat. Belum pulihnya perekonomian masyarakat, menjadi faktor utama penyebab penolakan rakyat terhadap sistem pajak.

Oleh karena kuatnya penolakan masyarakat terhadap sistem baru yang akan dijalankan, maka sebelumnya pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Belanda di Sumatera Barat bersama-sama dengan para penghulu kepala,

mensosialisasikan peraturan baru ini, seraya membujuk masyarakat untuk dapat mematuhi. Akhirnya, pada tahun 1908, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan *Belasting op de bedrijfsen andere inkomsten* (pajak atas penghasilan perusahaan atau penghasilan-penghasilan lainnya). Peraturan baru ini tidak hanya menyinggung kaum adat bahkan juga kalangan ulama. Golongan yang disebutkan terakhir ini, dalam berbagai peraturan pemerintah sebelumnya, --tidak hanya di Minangkabau--, dibebaskan dari segala bentuk pajak. Alasannya pada waktu itu adalah kelompok ulama dan para guru-guru agama tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi hanya bergantung dari sumbangan masyarakat (Rusli Amran, 1988: 91). Golongan lainnya yang mendapatkan kebebasan membayar pajak adalah para pegawai negeri dan para kepala yang diangkat oleh pemerintah.

Kuatnya penolakan masyarakat terhadap sistem pajak ini, memaksa Belanda mengambil langkah-langkah strategis supaya sistem pajak ini dapat berjalan maksimal. Salah satunya adalah dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat di seluruh negeri. Novel TTPRSSB di sini turut menjadi media sosialisasi itu. Novel ini sendiri terbit pada tahun 1925, atau 17 tahun setelah diberlakukan sistem pajak tersebut. Hal ini menandakan tidak maksimalnya pemberlakuan sistem pajak di Sumatera Barat, karena hingga novel ini terbit, masih banyak masyarakat yang menentang sistem tersebut.

“... Anak negeri rata-rata membayar belasting, djadinja belandja negeri dipikoel bersama sama. Mendjoeal kopi ke goedang Goebnemen, seperti makan benak anak boeah. Lihatlah sekarang! Beloem beberapa lama membayar belasting, kopi soedah boleh didjual dimana-mana dengan harga f.30,- sepikoel, padahal daholoenya tetap f. 12.50,- sepikoel ... (Maradjo. 1925: 33)

Aksi penentangan rakyat terhadap peraturan pajak ini, ditandai dengan munculnya perlawanan-perlawanan terbuka di berbagai daerah Sumatera Barat, seperti Kamang dan Manggopoh, tidak dapat dilepaskan dari peran koalisi kaum adat dan kaum agama. Setahun sebelum terjadinya perang Kamang, misalnya, penerbit majalah Islam Al-Imam menerbitkan sebuah buku yang berisikan butir-butir Plakat Panjang (Amran, 1988: 80). Buku ini dikirimkan ke Minangkabau untuk diedarkan. Semenjak itu di wilayah ini beredar selebaran dan poster-poster yang dipasang di tempat-tempat umum untuk menggugah kembali kesadaran rakyat akan perlakuan pemerintah yang mengingkari janji-janji yang pernah ditandatanganinya. Penentangan rakyat mengemuka pada saat pemerintah mengumumkan peraturan ini untuk pertama kalinya. Pada waktu ini hampir semua Laras menolak pemberlakuan peraturan ini dengan berbagai alasan yang masuk akal. Penolakan rakyat yang diwakili oleh Kepala Laras masing masing itu semakin membangkitkan semangat rakyat di beberapa daerah untuk menentang diberlakukannya peraturan pajak ini.

Puncak penentangan rakyat terhadap peraturan pajak adalah pada saat rakyat Kamang dan Manggopoh melakukan aksi perlawanan terbuka terhadap

Belanda pada bulan Juni 1908. Perlawanan rakyat Kamang dikenal dengan “Perang Kamang”. Daerah yang dulunya menjadi basis gerakan Paderi pada awal abad ke-19 ini adalah wilayah agraris dengan kehidupan beragama yang kental. Pemberlakuan peraturan pajak dirasakan sangat memberatkan rakyat di daerah ini. Karena itu, pada bulan Juni 1908, mereka mengadakan aksi penolakan besar-besaran terhadap peraturan pajak. Rakyat Kamang berdemonstrasi di depan Kantor Luhak Agam di Bukittinggi.

Di dalam novel TTPRSSB, situasi memanasnya suhu politik daerah pasca diberlakukannya peraturan *belasting* ini digambarkan dalam situasi ketika Moh. Roesjid meminta izin kepada TPR untuk pulang ke kampungnya untuk bergabung dengan para pemberontak.

“.... Sebaloemnya terjadi pemberontakan itoe, tentoelah mereka itoe moepakat dengan rahsia, akan meminta belastingnja kembali, djika tidak maoe dengan loenak dengan keraspun akan diminta djoega. Sementara itoe beberapa banjahnja yang diadjar ilmoe koet kebal, sedang bersilat memanglah mereka itu soedah mahir, karena bersilat itoe amat digemari orang lintaoe ... ” (Maradjo. 1928: 21).

Aksi ini diakhiri dengan perundingan wakil rakyat Kamang yaitu Datuk Machudum, Datuk Sidi Gadang dan Datuk Kondo. Namun hasil perundingan ini gagal karena kuatnya komitmen wakil rakyat ini. Hal yang lebih menyakitkan rakyat pada waktu ini ialah kecurangan Belanda dengan menahan wakil mereka yang diutus untuk berunding. Inilah yang memicu meletusnya Perang Kamang pada tanggal 15 Juni 1908 (Taufik Abdullah dan S. Budhisantoso (ed.), 1983/84:44-45).

Daftar Kepustakaan

- Awwali, Muchlis. 2006. “Wacana Poskolonial dalam Novel Siti Nurbaya: Perspektif *Cultural Studies*,” tesis M.Si., Denpasar: Program Kajian Budaya-Universitas Udayana.
- Damono, Supardi Djoko. 1979. “Novel Indonesia Sebelum Perang.” Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1984. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dahlan, Muhidin M, (editor). 2001. “Postkolonialisme: Sikap Kita Terhadap Imperialisme.” Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Faruk. 1999. *Hilangnya Pesona Dunia: Sitti Nurbaya, Budaya Minang, Struktur Sosial Kolonial*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- _____. 2002. *Novel-novel Indonesia Tradisi Balai Pustaka: 1920-1942*. Yogyakarta: Gama Media.
- Junus, Umar, 1982, “Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode di sekitar Sastra Melayu dan Indonesia,” disertasi Ph.D., Jabatan Pengajian Melayu, University Malaya Kuala Lumpur.
- Luxembur, Jan Van. Mieke Bal. Willem G. Weststeijn. 1991. “Tentang Sastra,” (Terj. Akhadiati Ikram). Jakarta: Intermedia.
- Maradjo, S. B. 1925. “Tjeritera Toeankoe Pantjoeran Rawang dan Sja’ir Si Bakri.”

- Drukkerij* Balai Poestaka.
- Mahayana, Maman S. 2001. *Akar Melayu: Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia*. Magelang: Indonesiatara.
- Nurgiyantoro. Burhan. 1996. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Retnaningsih, Dra. Aning. 1965. *Roman Dalam Masa Pertumbuhan Kesusasteraan Indonesia Modern*. Djakarta: Erlangga.
- Sumardjo, Jakob. 1992. *Lintasan Sastra Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Salim, Drs. Peter. Yenny Salim, B.Sc. 1991. "Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer." Jakarta: Modern English Press.
- Sudarmoko. 2005. "Roman Pergaoelan (1938-1941): Praktik Ideologi Sastra di Daerah," tesis M.A., *Talen en Culturen van Zuid-Oost Azië en Oceanië*. Universiteit Leiden.
- Watson, C.W., 1972. "*The Sociology of the Indonesian Novel 1920-1955*," tesis MA, University of Hull.